

Pembuatan Peta Desa untuk Mendukung Informasi Spasial dan Perencanaan Pembangunan Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng

Muh. Adriansyah Ansar^{1*}, Wahidah Abdullah², Muh. Saleh Ridwan³, Kamal Wahyudi⁴, Riska Amalia Ramadani⁵, Ummi Kalsum⁶, Isra Karida Andini⁷, Nur Rizka Afrilyana⁸, Zakiyah Syamha Asri⁹, Andi Nur Ilda Damayanti¹⁰, Luthfiah Atifah¹¹, Raodatul Jannah¹²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

²Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁴Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁵Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁶Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁷Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁸Program Studi Teknik Informatika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁹Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹⁰Program Studi Keperawatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹¹Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

¹²Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email korespondensi: adrianansar9@gmail.com

ABSTRAK

Ketersediaan informasi spasial yang jelas mengenai batas wilayah, jaringan jalan, dan fasilitas desa diperlukan untuk mendukung administrasi serta perencanaan pembangunan di tingkat desa. Di Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, informasi mengenai batas wilayah dan berbagai objek penting belum sepenuhnya tersaji dalam satu media peta yang praktis digunakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Kegiatan pengabdian melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan memperbarui informasi spasial desa dan menghasilkan peta yang memuat batas wilayah, batas dusun, jaringan jalan, serta lokasi fasilitas umum. Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif melalui observasi lapangan, diskusi dan penelusuran titik batas bersama perangkat desa dan masyarakat, pengumpulan titik lokasi, pengolahan data spasial menggunakan ArcGIS, serta verifikasi dan penyempurnaan peta. Kegiatan berlangsung pada September 2026 dengan tahapan penyusunan peta pada 1–4 September, pembaruan batas pada 12–20 September, dan penyampaian hasil melalui seminar pada 23 September 2026. Hasil kegiatan berupa peta Desa Batu Karaeng yang telah dicetak dan ditempatkan pada tiga lokasi berbeda di setiap dusun. Peta tersebut menjadi media informasi visual yang membantu penyajian lokasi fasilitas, jaringan jalan, dan pembagian wilayah desa, serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung pendataan dan perencanaan pembangunan desa.

Kata Kunci: peta desa; informasi spasial; pemetaan partisipatif; ArcGIS

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga penyelenggaraan administrasi, pelayanan publik, pengelolaan wilayah, dan perencanaan pembangunan memerlukan informasi yang dapat menggambarkan kondisi wilayah secara jelas. Ketersediaan peta desa menjadi penting karena informasi mengenai batas wilayah, jaringan transportasi, toponim, sarana dan prasarana, serta penggunaan lahan dapat disajikan dalam satu kerangka informasi geospasial. Badan Informasi Geospasial menempatkan peta desa sebagai salah satu instrumen penyediaan informasi geospasial hingga tingkat desa yang dapat mendukung kebutuhan pembangunan (Badan Informasi Geospasial, 2016). Dalam konteks pemerintahan desa, informasi spasial juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memahami kondisi wilayah dan menyusun perencanaan yang lebih terarah.

Desa Batu Karaeng merupakan salah satu desa di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Berdasarkan publikasi statistik Kabupaten Bantaeng, Kecamatan Pa'jukukang memiliki luas 48,9 km², terdiri atas 10 desa, dan pada tahun 2024 memiliki 38.644 penduduk (Badan Pusat Statistik

Kabupaten Bantaeng, 2025). Skala wilayah dan jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan informasi wilayah pada tingkat kecamatan dan desa membutuhkan dukungan data yang mudah dipahami. Pada tingkat Desa Batu Karaeng, hasil observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa menunjukkan bahwa informasi mengenai batas administrasi, lokasi fasilitas, jaringan jalan, penggunaan lahan, serta kondisi wilayah belum sepenuhnya tersaji dalam satu media peta yang dapat digunakan secara praktis oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Kebutuhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan gambar wilayah, tetapi juga dengan proses pengumpulan dan verifikasi informasi di lapangan. Peta yang digunakan untuk mendukung perencanaan perlu merepresentasikan objek yang relevan dengan kondisi aktual dan disusun melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman kegiatan pengabdian di desa lain menunjukkan bahwa penyusunan peta desa dapat membantu pemerintah desa menyediakan informasi spasial untuk kebutuhan pembangunan dan pengelolaan wilayah (Adeswastoto dkk., 2022; Rendra dkk., 2024). Pemetaan yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat juga dapat membantu mengonfirmasi batas serta objek lokal melalui pengetahuan yang dimiliki masyarakat setempat (Rendra dkk., 2024).

Pemanfaatan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) mendukung proses pengolahan data spasial secara lebih sistematis. Maliki dkk. (2026) menunjukkan bahwa penyusunan peta desa berbasis data spasial dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan wilayah desa, sedangkan Widodo dkk. (2024) memperlihatkan bahwa pemetaan digital dapat menjadi media visualisasi informasi yang lebih mudah digunakan. Kegiatan pemetaan berbasis KKN juga telah diterapkan pada desa lain untuk menghasilkan peta yang memuat batas, infrastruktur, dan informasi wilayah sebagai bahan pendukung perencanaan (Triono dkk., 2025). Temuan-temuan tersebut memperkuat relevansi penggunaan pemetaan digital dan pelibatan pemangku kepentingan lokal dalam kegiatan di Desa Batu Karaeng.

Kegiatan ini memiliki relevansi pada penerapan pemetaan desa yang menggabungkan observasi lapangan, verifikasi informasi bersama pemerintah desa dan masyarakat, serta pengolahan data menggunakan ArcGIS. Berbeda dari sekadar menyusun tampilan peta, kegiatan diarahkan untuk memperbarui informasi batas wilayah dan menghimpun titik lokasi fasilitas serta jaringan jalan yang dibutuhkan desa. Luaran kegiatan kemudian dicetak dan ditempatkan pada lokasi yang dapat diakses masyarakat. Pendekatan tersebut sejalan dengan pengalaman pengabdian lain yang menempatkan peta sebagai media informasi sekaligus pendukung perencanaan pembangunan desa (Hawahera dkk., 2025; Nafisa dkk., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan menghasilkan peta Desa Batu Karaeng yang memuat informasi batas wilayah, batas dusun, jaringan jalan, serta fasilitas penting yang diperoleh dan diverifikasi melalui kegiatan lapangan. Manfaat yang diharapkan adalah tersedianya media informasi spasial yang lebih terstruktur bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk membantu pendataan, pengelolaan wilayah, penyebaran informasi fasilitas, dan perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk peta, tetapi juga membangun proses verifikasi informasi spasial melalui partisipasi pihak lokal.

2. METODE PELAKSANAAN

2.1. Tempat, Waktu, dan Khalayak Sasaran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Batu Karaeng, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, pada bulan September 2026 dan terintegrasi dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Khalayak sasaran kegiatan adalah pemerintah desa dan masyarakat Desa Batu Karaeng. Pemilihan sasaran didasarkan pada kebutuhan desa terhadap informasi spasial yang dapat digunakan sebagai media informasi wilayah dan bahan pendukung pengelolaan serta perencanaan pembangunan. Rangkaian kegiatan mencakup observasi awal, penyusunan peta, pembaruan batas wilayah, verifikasi data, pemasangan hasil peta, serta penyampaian hasil melalui seminar.

2.2. Tahapan Pelaksanaan

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan dan kondisi awal wilayah. Kegiatan dilakukan melalui observasi langsung serta diskusi dengan perangkat desa untuk memperoleh informasi mengenai batas wilayah dan objek penting yang perlu ditampilkan pada peta. Identifikasi titik batas dilakukan di wilayah Biang Loe Utara dan Lumpangan. Pengumpulan data titik lokasi juga dilakukan di Dusun Bonto Tene, Dusun Batu Karaeng, dan Dusun Ma'lero sebagai data pendukung penyusunan peta.

Tahap kedua adalah perencanaan dan penyusunan peta yang dilaksanakan pada 1–4 September 2026. Data hasil observasi dikumpulkan, diseleksi, dan diolah menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Data disusun menjadi informasi spasial yang mencakup batas wilayah, jaringan jalan, lokasi dusun, dan titik objek yang

telah diidentifikasi. Pada tahap ini dilakukan pengaturan simbologi dan layout agar informasi dapat dibaca secara sistematis.

Tahap ketiga adalah pembaruan batas desa yang dilaksanakan pada 12–20 September 2026. Peninjauan lapangan dilakukan terhadap kondisi batas wilayah dan titik yang digunakan sebagai referensi. Wilayah yang menjadi bagian dari identifikasi batas meliputi Biang Loe Utara dan Lumpangan. Informasi lapangan digunakan untuk menyesuaikan data spasial yang akan ditampilkan pada peta.

Tahap keempat adalah verifikasi dan pengolahan data spasial. Data hasil observasi, titik lokasi, dokumentasi, dan informasi batas diperiksa kembali dengan mencocokkan informasi lapangan dan data spasial yang digunakan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian posisi objek atau informasi, dilakukan pengecekan dan perbaikan sebelum peta diselesaikan. Tahap ini menempatkan perangkat desa dan masyarakat sebagai sumber pengetahuan lokal dalam mengonfirmasi informasi wilayah.

Tahap kelima adalah penyusunan hasil dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Peta yang telah diselesaikan dicetak dan ditempatkan pada tiga lokasi berbeda di setiap dusun di Desa Batu Karaeng. Selain itu, seminar hasil dan kegiatan ramah tamah dilaksanakan pada 23 September 2026 pukul 19.30 WITA sebagai sarana penyampaian hasil kepada masyarakat dan pihak terkait.

Tahap keenam berupa monitoring dan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan. Monitoring diarahkan untuk memastikan tahapan pengumpulan data, pemetaan, dan pembaruan batas berjalan sesuai rencana. Evaluasi dilakukan dengan meninjau kesesuaian antara informasi lapangan dan hasil pengolahan peta. Hasil evaluasi digunakan untuk melakukan pengecekan ulang dan penyempurnaan data apabila ditemukan ketidaksesuaian.

2.3. Indikator Keberhasilan dan Metode Evaluasi

Indikator keberhasilan kegiatan ditetapkan berdasarkan tersedianya data batas wilayah dan objek desa yang telah dikumpulkan, tersusunnya peta Desa Batu Karaeng, tersedianya unsur pendukung seperti legenda, simbol, nama wilayah, dan jaringan jalan, serta terpasangnya hasil peta pada lokasi yang dapat diakses masyarakat. Evaluasi dilakukan melalui pengecekan ulang data dan posisi objek, pencocokan informasi dengan hasil observasi lapangan, serta diskusi dengan perangkat desa dan masyarakat pada tahap penyampaian hasil. Karena naskah tidak memuat pengukuran kuantitatif perubahan pengetahuan atau keterampilan, keberhasilan kegiatan dilaporkan berdasarkan keterlaksanaan tahapan dan tersedianya luaran peta yang dihasilkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan dan Luaran Pemetaan

Pembuatan peta desa ditetapkan sebagai salah satu program kerja setelah tim melakukan observasi selama satu minggu pada awal pelaksanaan KKN. Program dipilih berdasarkan kebutuhan terhadap media informasi yang dapat memperlihatkan kondisi dan tata letak wilayah secara lebih jelas. Proses penyusunan peta menggunakan ArcGIS dan memanfaatkan data batas wilayah, jaringan jalan, lokasi dusun, serta titik fasilitas dan objek penting yang dihimpun melalui kegiatan lapangan. Fasilitas yang dicantumkan antara lain masjid, posyandu, gedung pemerintahan, fasilitas umum, dan objek lain yang teridentifikasi selama pengumpulan data.

Penyusunan peta dilakukan pada 1–4 September 2026. Setelah selesai, peta dicetak dan ditempatkan pada tiga lokasi berbeda di setiap dusun di Desa Batu Karaeng. Penempatan tersebut dimaksudkan agar informasi spasial tidak hanya tersimpan sebagai dokumen, tetapi dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian lain, peta desa juga digunakan sebagai produk yang dapat ditempatkan pada fasilitas desa untuk mendukung akses masyarakat terhadap informasi wilayah (Hawahera dkk., 2025; Nafisa dkk., 2024).

Pengumpulan data tidak dilakukan hanya dengan mengandalkan data spasial yang telah tersedia. Tim memperoleh informasi dari Kepala Desa Batu Karaeng, Bapak Gafrawi, S.E., terkait penentuan batas dan pemetaan desa, serta dari tokoh masyarakat sekaligus kepala dusun, Bapak Sangkala, terkait konfirmasi titik lokasi wilayah. Informasi tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil observasi dan dimasukkan ke dalam pengolahan peta menggunakan ArcGIS. Proses ini memperkuat aspek partisipatif karena pengetahuan lokal digunakan sebagai bagian dari verifikasi informasi spasial.

Secara visual, luaran kegiatan berupa peta yang menyajikan pembagian wilayah, jaringan jalan, dan lokasi fasilitas dalam satu media. Penyusunan unsur peta melalui simbol, legenda, nama wilayah, dan informasi pendukung membantu membedakan objek yang ditampilkan. Pendekatan semacam ini relevan dengan penyusunan peta desa yang menekankan penyajian informasi batas, transportasi, sarana dan prasarana, serta unsur wilayah lain secara sistematis (Badan Informasi Geospasial, 2016).

Tabel 1. Tahapan dan Hasil Pelaksanaan Pembuatan Peta Desa Batu Karaeng

Tahapan Kegiatan	Hasil/Capaian	Keterangan
Pengumpulan data wilayah desa	Data batas wilayah, dusun, dan fasilitas desa terkumpul	Terlaksana
Identifikasi batas wilayah	Batas Desa Batu Karaeng dan wilayah sekitarnya berhasil diidentifikasi	Terlaksana
Pengumpulan titik koordinat	Titik lokasi dan batas wilayah dikumpulkan sebagai bahan penyusunan peta	Terlaksana
Penyusunan dan penggambaran peta	Data yang diperoleh diolah menjadi peta wilayah Desa Batu Karaeng	Terlaksana
Penyempurnaan peta	Peta dilengkapi dengan legenda, simbol, nama wilayah, jalan, dan informasi pendukung lainnya	Terlaksana

Sumber: Data olahan tim.

3.2. Dokumentasi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Luaran

Dokumentasi proses menunjukkan keterlibatan tim dalam memeriksa dan menyusun informasi pada peta sebelum hasil dipasang. Proses tersebut merupakan bagian dari kegiatan verifikasi dan penyempurnaan luaran, bukan sekadar kegiatan dokumentasi. Gambar 1 memperlihatkan proses penyusunan dan pemeriksaan peta, sedangkan Gambar 2 memperlihatkan pemasangan peta pada salah satu lokasi di desa.



Gambar 1. Proses penyusunan dan pemeriksaan Peta Desa Batu Karaeng.

Setelah peta selesai, hasil dipasang pada lokasi yang dapat dilihat masyarakat. Pemasangan peta memperluas fungsi luaran dari dokumen administrasi menjadi media informasi publik yang dapat membantu masyarakat mengenali pembagian wilayah dan lokasi fasilitas. Gambar 2 menunjukkan salah satu proses pemasangan peta hasil kegiatan.



Gambar 2. Pemasangan Peta Desa Batu Karaeng pada salah satu lokasi di desa.

3.3. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan peta desa dapat dilakukan melalui kombinasi antara data spasial, observasi lapangan, dan pengetahuan lokal dari pemerintah desa serta masyarakat. Pola tersebut sejalan dengan kegiatan pemetaan partisipatif di Desa Semambung yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pemetaan dan survei lapangan untuk memastikan kesesuaian hasil (Rendra dkk., 2024). Dalam konteks Batu Karaeng, keterlibatan pihak lokal digunakan terutama untuk mengonfirmasi batas dan titik lokasi, sehingga informasi yang disajikan tidak hanya berasal dari pengolahan data spasial secara teknis.

Penggunaan ArcGIS memberikan kerangka kerja untuk mengelola beberapa jenis objek spasial dalam satu peta. Data batas dapat disajikan sebagai garis pembatas, jaringan jalan sebagai unsur garis, dan fasilitas sebagai titik dengan simbol yang dibedakan. Penyusunan unsur tersebut sesuai dengan fungsi peta desa sebagai media yang menyajikan informasi wilayah, transportasi, sarana, dan prasarana (Badan Informasi Geospasial, 2016). Adeswastoto dkk. (2022) juga menunjukkan penggunaan ArcGIS dalam pengolahan data dan penyusunan layout peta desa. Dengan demikian, perangkat lunak berfungsi sebagai sarana pengolahan dan visualisasi, sementara validitas informasi tetap bergantung pada kualitas data dan proses verifikasi lapangan.

Luaran kegiatan berupa peta yang dicetak dan ditempatkan di beberapa lokasi memiliki nilai praktis bagi penyebaran informasi. Kegiatan pemetaan di desa lain juga menunjukkan bahwa peta yang dipasang pada ruang publik dapat digunakan sebagai media informasi mengenai infrastruktur dan kondisi wilayah (Hawahera dkk., 2025). Pada Desa Batu Karaeng, penempatan pada tiga lokasi berbeda di setiap dusun memperluas kemungkinan akses masyarakat terhadap informasi. Namun, naskah kegiatan belum menyediakan pengukuran kuantitatif mengenai tingkat penggunaan peta, perubahan pengetahuan masyarakat, atau dampak langsung terhadap kualitas perencanaan. Oleh karena itu, manfaat yang dilaporkan dalam artikel ini dibatasi pada fungsi peta sebagai media informasi dan bahan pendukung pendataan serta pengelolaan wilayah.

Kegiatan ini juga memperlihatkan pentingnya verifikasi sebelum informasi spasial dipublikasikan. Peta desa yang digunakan untuk perencanaan perlu memiliki informasi yang sesuai dengan kondisi lapangan dan mengikuti prinsip penyajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengalaman Triono dkk. (2025) menunjukkan bahwa penyusunan peta dalam kegiatan KKN dapat menghasilkan representasi wilayah yang lebih jelas untuk mendukung perencanaan. Maliki dkk. (2026) menekankan kebutuhan data spasial untuk pengelolaan wilayah desa, sedangkan Widodo dkk. (2024) menunjukkan nilai pemetaan digital sebagai media visualisasi informasi. Hasil kegiatan Batu Karaeng memperkuat pola tersebut melalui penerapan pada konteks lokal yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat dalam pengumpulan serta verifikasi data.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada penerapan pemetaan sebagai luaran KKN yang menggabungkan pembaruan informasi batas wilayah, pengumpulan titik fasilitas dan jaringan jalan, verifikasi berbasis pengetahuan lokal, serta pemasangan peta pada lokasi yang dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada pembuatan produk digital, tetapi mengarahkan hasil pengolahan data menjadi media informasi fisik yang dapat digunakan dalam lingkungan desa. Meski demikian, keberlanjutan pemanfaatan peta akan bergantung pada pembaruan data apabila terjadi perubahan batas, jaringan jalan, atau fasilitas di masa mendatang.

3.4. Implikasi, Keterbatasan, dan Keberlanjutan

Dari sisi pengelolaan informasi, peta yang dihasilkan memberikan satu media visual yang menggabungkan beberapa informasi yang sebelumnya tersebar dalam pengetahuan lapangan, hasil observasi, dan data spasial. Penggabungan tersebut penting karena kebutuhan informasi pemerintah desa tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah, tetapi juga dengan lokasi fasilitas dan keterhubungan jaringan jalan. Peta dapat membantu pengguna memperoleh gambaran awal mengenai hubungan spasial antarobjek tanpa harus menelusuri informasi secara terpisah. Dalam kegiatan pengabdian berbasis pemetaan, fungsi tersebut menjadi salah satu nilai praktis utama dari luaran yang dihasilkan (Adeswastoto dkk., 2022; Maliki dkk., 2026).

Pelibatan pemerintah desa dan masyarakat juga mempunyai implikasi terhadap kualitas informasi lokal. Batas wilayah dan nama lokasi tertentu merupakan informasi yang lebih mudah dikonfirmasi oleh pihak yang mengenal kondisi setempat. Karena itu, proses verifikasi tidak ditempatkan hanya sebagai pemeriksaan teknis terhadap file peta, tetapi sebagai proses pencocokan antara representasi spasial dan kondisi yang diketahui di lapangan. Pendekatan partisipatif semacam ini telah digunakan pada kegiatan pemetaan desa lain dan dinilai membantu proses penyusunan peta administrasi untuk kebutuhan perencanaan (Rendra dkk., 2024).

Meskipun demikian, terdapat keterbatasan pada hasil kegiatan yang perlu diperhatikan. Artikel ini belum menyajikan uji ketelitian posisi secara kuantitatif, ukuran kesalahan koordinat, atau evaluasi terukur mengenai perubahan pengetahuan masyarakat setelah peta dipasang. Naskah juga tidak menyediakan data kuantitatif mengenai tingkat pemanfaatan peta oleh pemerintah desa dan masyarakat. Oleh sebab itu, istilah “akurat” dalam konteks kegiatan ini dibatasi pada kesesuaian informasi yang diperoleh melalui observasi dan verifikasi dengan pihak lokal, bukan pada hasil uji akurasi geospasial formal. Pembatasan ini penting agar manfaat kegiatan tidak dinyatakan melampaui bukti yang tersedia.

Keberlanjutan luaran terutama bergantung pada pemutakhiran data. Peta dapat mengalami ketidaksesuaian apabila terjadi perubahan batas, pembukaan atau perubahan jaringan jalan, pembangunan fasilitas baru, atau perubahan fungsi bangunan. Karena itu, pemerintah desa dapat menggunakan peta yang telah dihasilkan sebagai basis informasi awal dan melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan kondisi wilayah. Praktik pemutakhiran tersebut sejalan dengan sifat data spasial yang perlu dipelihara agar tetap relevan untuk kebutuhan administrasi dan pembangunan. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak berhenti pada penyerahan peta, tetapi dapat dilanjutkan melalui pemeliharaan informasi secara berkala.

3.5. Keterkaitan Hasil dengan Tujuan Kegiatan

Jika dikaitkan dengan tujuan kegiatan, luaran peta telah memenuhi fungsi dasar sebagai media penyajian informasi spasial Desa Batu Karaeng. Tujuan pertama, yaitu memperbarui informasi batas wilayah, dilakukan melalui peninjauan lapangan pada 12–20 September 2026 dan identifikasi titik yang berkaitan dengan wilayah Biang Loe Utara dan Lumpangan. Tujuan kedua, yaitu menghimpun informasi mengenai objek dan fasilitas desa, dilakukan melalui pengumpulan titik lokasi di beberapa dusun dan pencantuman fasilitas pada peta. Tujuan ketiga, yaitu menyediakan media informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah desa dan masyarakat, diwujudkan melalui pencetakan serta pemasangan peta pada beberapa lokasi di desa. Rangkaian tersebut menunjukkan hubungan yang langsung antara kebutuhan awal, proses pelaksanaan, dan luaran kegiatan.

Kesesuaian antara tahapan dan luaran juga terlihat dari tabel hasil pelaksanaan. Seluruh tahapan yang direncanakan dalam kegiatan—pengumpulan data, identifikasi batas, pengumpulan titik koordinat, penyusunan peta, dan penyempurnaan—dinyatakan terlaksana. Penyempurnaan mencakup penambahan legenda, simbol, nama wilayah, jaringan jalan, dan informasi pendukung. Dengan demikian, hasil yang dilaporkan bukan hanya keberadaan file peta, tetapi juga penyelesaian unsur-unsur yang diperlukan agar peta dapat dibaca sebagai media informasi. Hal ini sejalan dengan pendekatan penyajian peta desa yang menempatkan batas, transportasi, sarana, dan prasarana sebagai bagian penting dari informasi spasial desa (Badan Informasi Geospasial, 2016).

Dibandingkan dengan kegiatan sejenis, konteks Batu Karaeng memperlihatkan pola yang serupa dalam hal pemanfaatan peta untuk mendukung kebutuhan desa, tetapi memiliki fokus kegiatan yang lebih terarah pada pembaruan informasi batas dan penyajian fasilitas serta jaringan jalan. Adeswastoto dkk. (2022) menempatkan peta desa sebagai luaran pengabdian yang dapat diberikan kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan. Rendra dkk. (2024) menunjukkan pentingnya pemetaan partisipatif dalam mengonfirmasi informasi administrasi. Triono dkk. (2025) memperlihatkan bahwa kegiatan KKN dapat menghasilkan peta yang digunakan untuk membantu pemahaman terhadap tata ruang desa. Kesamaan tersebut memperlihatkan bahwa peta desa merupakan luaran pengabdian yang relevan ketika permasalahan mitra berkaitan dengan keterbatasan informasi spasial.

Perbedaan penting antara kegiatan ini dan beberapa kegiatan terdahulu terletak pada bentuk pemanfaatan luaran setelah peta selesai dibuat. Peta Batu Karaeng tidak hanya diserahkan kepada pemerintah

desa, tetapi juga dicetak dan dipasang pada beberapa lokasi yang dapat dilihat masyarakat. Pola tersebut memperluas sasaran pemanfaatan dari pengguna administratif menjadi pengguna publik. Nafisa dkk. (2024) menunjukkan bahwa produk peta desa juga dapat berfungsi sebagai media informasi bagi masyarakat ketika ditempatkan pada ruang yang mudah diakses. Dalam kegiatan Batu Karaeng, fungsi tersebut diwujudkan melalui pemasangan peta di lokasi-lokasi dalam dusun.

Dari sisi teknologi, penggunaan ArcGIS mempermudah penggabungan beberapa jenis data spasial dalam satu produk. Namun, teknologi tidak dapat menggantikan kebutuhan akan verifikasi informasi lapangan. Peta yang secara visual menarik tetap memerlukan data yang benar dan sesuai dengan kondisi wilayah. Karena itu, kegiatan ini menempatkan observasi, diskusi, dan pencocokan data sebagai tahapan yang mendahului penyempurnaan peta. Pendekatan tersebut konsisten dengan pengalaman kegiatan pemetaan desa yang menggunakan data lapangan dan perangkat lunak pemetaan untuk menghasilkan produk yang lebih informatif (Maliki dkk., 2026; Hawahera dkk., 2025).

Pemanfaatan peta sebagai bahan pendukung perencanaan juga perlu dipahami secara proporsional. Peta dapat menyediakan informasi lokasi dan hubungan spasial yang membantu pemerintah desa mengenali objek serta kondisi wilayah, tetapi peta bukan satu-satunya dasar pengambilan keputusan pembangunan. Perencanaan tetap memerlukan data sektoral, data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, serta pertimbangan teknis dan kebijakan yang sesuai. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini lebih tepat diposisikan sebagai salah satu sumber informasi spasial pendukung. Posisi tersebut sesuai dengan tujuan penyediaan informasi geospasial pada tingkat desa yang dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman wilayah dan mendukung pembangunan (Badan Informasi Geospasial, 2016).

Kegiatan juga memberikan pembelajaran bahwa kualitas luaran pengabdian perlu dilihat dari proses dan keterpakaiannya. Proses verifikasi bersama pihak lokal memberikan dasar bagi penyusunan peta, sedangkan pemasangan pada ruang publik memberikan peluang bagi luaran untuk digunakan di luar kegiatan KKN. Akan tetapi, karena tidak terdapat instrumen evaluasi kuantitatif terhadap pengguna, artikel ini tidak menyimpulkan adanya peningkatan pengetahuan, efisiensi administrasi, atau peningkatan kualitas perencanaan secara terukur. Pembatasan klaim tersebut menjaga kesesuaian antara hasil yang benar-benar diperoleh dengan kesimpulan yang ditarik dari kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan memperlihatkan bahwa pemetaan desa dapat menjadi bentuk pengabdian yang menghubungkan kompetensi teknis pemetaan dengan kebutuhan administratif dan informasi masyarakat. Produk peta yang dihasilkan dapat digunakan sebagai titik awal untuk pengelolaan informasi spasial desa, sedangkan proses partisipatif memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk memeriksa informasi yang akan ditampilkan. Apabila pada masa mendatang tersedia data pembaruan dan mekanisme pemeliharaan, peta dapat diperbarui sehingga tetap relevan dengan perkembangan wilayah Desa Batu Karaeng.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pembuatan Peta Desa Batu Karaeng telah dilaksanakan melalui rangkaian observasi, pengumpulan dan verifikasi data, identifikasi batas wilayah, pengolahan data spasial menggunakan ArcGIS, penyusunan peta, serta pemasangan hasil pada beberapa lokasi di desa. Luaran kegiatan berupa peta yang memuat batas wilayah, batas dusun, jaringan jalan, fasilitas umum, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan objek penting lain yang teridentifikasi dalam kegiatan lapangan. Pelibatan pemerintah desa dan masyarakat membantu proses konfirmasi informasi mengenai batas dan titik lokasi sehingga data yang disajikan disesuaikan dengan hasil pengamatan lapangan. Peta yang dihasilkan berfungsi sebagai media informasi visual dan bahan pendukung pendataan serta pengelolaan wilayah desa. Berdasarkan hasil yang tersedia, tujuan penyediaan informasi spasial yang lebih terstruktur dapat dicapai melalui tersedianya peta yang telah dicetak dan ditempatkan pada lokasi yang dapat diakses masyarakat. Untuk keberlanjutan, pembaruan data peta perlu dilakukan apabila terjadi perubahan pada batas wilayah, jaringan jalan, atau fasilitas desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeswastoto, H., Islah, M., & Saputra, R. (2022). Penyusunan peta desa dalam rangka pengembangan desa di Desa Pulau Terap Kecamatan Kuok. **Journal of Social and Community Service*, 1*(2), 1–5.
<https://doi.org/10.31004/jestmc.v1i2.34>
- Badan Informasi Geospasial. (2016). **Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa**. Badan Informasi Geospasial.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantaeng. (2025). **Kecamatan Pa'jukukang dalam angka 2025**. BPS Kabupaten Bantaeng.

- Hawahera, C., Kibtiyah, M., Subhan, M., & Abdullah, I. (2025). Pembuatan peta tematik infrastruktur desa sebagai penunjang pembangunan Desa Sungai Bangkal Kabupaten Banjar. **Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3*(10), 5363–5368. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i10.3521>
- Maliki, R. Z., Adianton, A., Saputra, I. A., Jamaluddin, J., & Patta, A. K. (2026). Pembuatan peta Desa Tomoli Kecamatan Toribulu dengan data spasial. **Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat*, 5*(1), 11–18. <https://doi.org/10.36636/eduabdimas.v5i1.8285>
- Nafisa, S., Situmeang, W., Muliadi, R., & Afifah, N. (2024). Pembuatan peta Desa Wisata Suka Makmur. **Medani Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3*(3), 50–55. <https://doi.org/10.59086/jpm.v3i3.582>
- Rendra, M. I., Huda, M. M., Sandy, R. A., Roisewajid, S., Saputra, R. Y., & Abrori, A. N. (2024). Penyusunan peta administrasi desa dengan pemetaan partisipatif untuk mendukung perencanaan dan pembangunan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. **Abdimas Galuh*, 6*(1), 847–856. <https://doi.org/10.25157/ag.v6i1.13741>
- Triono, A., Sari, G. K., M. Farm, M. F., Prastiya, A., Ropik, M., Santi, T. P., Adista, A., Khasanah, U., Wijayanti, N., Azzahra, M. F., Sholekah, M., Putri, D. A., & Manshurin, M. (2025). Penyusunan peta desa dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Ngaringan Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan. **Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 3*(4), 317–323. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v3i4.152>
- Widodo, W., Adly, E., Cahyati, M. D., Chamim, A. N. N., Satriawan, B. J., Saputra, I. R., Pangestu, M. I. M., & Kusuma, T. Y. T. (2024). Peta digital kependudukan berbasis QGIS: Inovasi teknologi untuk visualisasi data kependudukan dan populasi di Dusun Mrisi, Bantul D.I. Yogyakarta. **Jurnal Surya Masyarakat*, 6*(2), 140–149. <https://doi.org/10.26714/jsm.6.2.2024.140-149>